|  |
| --- |
| **Partisipasi Politik dan Pemilu di Indonesia** |
| Secara umum, partisipasi politik digambarkan sebagai keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik, contohnya ikut kampanye, seminar, ikut dalam organisasi sosial politik, menjadi anggota partai, memilih dalam pemilu, dan lainnya. Individu ikut berpartisipasi dalam politik karena ada keyakinan bahwa keterlibatannya akan memberikan pengaruh kepada sistem politik yang disebut dengan *efficacy.* Namun demikian, terdapat pula individu-individu yang enggan berpolitik karena tidak mau, acuh tak acuh, dan tidak tertarik yang disebut dengan *apathy*. Partisipasi politik bisa bersifat otonom ketika terdapat kebebasan politik dalam memilih preferensi politiknya tanpa ada tekanan, intimidasi, atau iming-iming hadiah tertentu. Namun menjadi partisipasi yang dimobilisasi ketika preferensi atau pilihan politik seseorang didasarkan atas faktor dorongan pihak di luar dirinya. Bentuk partisipasi juga bisa bersifat konvensional ketika keterlibatan politik dilakukan melalui cara-cara umum yang biasa dilakukan sedangkan partisipasi non-konvensional dilakukan dengan cara-cara di luar kebiasaan atau tradisi umum semisal demonstrasi, kudeta, revolusi, dan tindak kekerasan lainnya.  Salah satu bentuk partisipasi politik individu adalah memberikan suara dalam pemilu baik untuk memilih anggota legislatif yang mewakili kepentingan rakyat di daerah dan pusat serta memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu sendiri merupakan mekanisme paling umum dari suatu negara demokratis untuk menentukan pilihan rakyat secara menyeluruh. Ada beberapa fungsi pemilu yaitu: (1) sebagai sarana legitimasi politik, (2) mekanisme sirkulasi kekuasaan, (3) representasi politik, (4) implementasi kedaulatan rakyat, dan (5) sarana sosialisasi dan pendidikan politik rakyat.  Secara umum, sistem pemilu dibagi menjadi dua yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Sistem distrik memilih hanya satu wakil atau satu kursi yang diperebutkan dalam satu distrik sedangkan sistem proporsional lebih terbuka karena terdapat lebih dari satu kursi yang diperebutkan oleh banyak kandidat. Oleh karenanya sistem distrik cenderung efektif apabila digunakan oleh negara dengan sistem kepartaian dwi-partai sedangkan proporsional oleh sistem kepartaian multi-partai yang menekankan pada pluralisme seperti halnya Indonesia.  Pemilu di Indonesia sudah dilaksanakan sejak tahun 1955 yang menghasilkan 4 (empat) partai pemenang yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Namun, polarisasi akibat empat pemenang pemilu tersebut menghasilkan ketidakstabilan politik yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet. Pemilu kedua di era Orde Baru dilaksanakan tahun 1971 dan selanjutnya tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Hegemoni Golkar dalam setiap pemilu Orde Baru yang menggunakan sistem pemilu proporsional dengan varian *closed list party* atau daftar tertutup ini tidak tertandingi. Pemilu pasca Orde Baru menekankan kepada kebebasan politik yang ditunjukkan dengan banyaknya partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilu. Sistem pemilu yang digunakan pun beragam, tidak lagi menekankan pada partai politik tapi lebih kepada anggota partai yang akan dipilih. Penerapan *electoral threshold* atau ambang batas pemilu dilakukan sebagai mekanisme untuk mengurangi jumlah partai yang banyak secara alamiah. Selain itu terdapat *parliamentary threshold* yang merupakan ambang batas yang diterapkan agar partai dapat duduk di DPR Pusat. Perubahan signifikan pemilu era reformasi ini adalah dengan diterapkannya pemilu eksekutif secara langsung, bahwa rakyat yang memilih langsung pemimpin mereka dan pilkada serentak untuk memilih kepala daerahnya.  Meskipun perubahan signifikan dilakukan penyelenggaraan pemilu namun tingkat golongan putih (golput) di Indonesia masih cukup tinggi. Pemilu 1955 mencatat angka golput sebesar 8.6% dan mengalami penurunan era Soeharto. Namun pasca Orde Baru justru meningkat tajam. Pada Pilpres 2004 putaran pertama, golput tercatat 21.8% dan putaran kedua 23.4%. Sedangkan Pileg 2004 golput tercatat sebesar 15.9%. Pada Pilpres 2009 golput sebesar 28.3% sedangkan Pileg 29.1%. Pada Pileg 2014 lalu ternyata angka golput masih juga tinggi yaitu 24.89% sedangkan pada Pilpres 2014 sebesar 29.01%. Banyak faktor dapat memengaruhi mengapa angka golput cenderung tinggi di Indonesia, yaitu kurangnya sosialisasi politik, tingkat kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah dan persoalan sistem administrasi yang menghambat orang untuk dapat memilih dalam pemilu. |